

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.tempo.co
Media Cetak	

Prihatin, DPRD DKI Realokasi Rp 256,5 M untuk Penanganan Covid-19

DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mengalihkan sejumlah anggaran kegiatan di tahun ini sebesar Rp 256,5 miliar untuk penanggulangan wabah Covid-19. Keputusan itu disampaikan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam keterangan tertulisnya.

“Karena kita ikut prihatin, dan ini bentuk support kita dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Karena itu semua kegiatan AKD kita nol-kan,” ujar Prasetio dalam keterangan tertulisnya, Senin 27 April 2020.

Prasetio menyebutkan berdasarkan rapat pimpinan gabungan (Rapingab), efisiensi anggaran dilakukan pada semua kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD), Sosialisasi Perda, dan Reses.

Dalam rapat yang sama, pimpinan fraksi dan komisi di DPRD DKI Jakarta juga menyepakati efisiensi untuk realokasi anggaran pada kegiatan reses, pembahasan Bapemperda, pembahasan Banggar, pembahasan Pansus, pembahasan Bamus, pembahasan Badan Kehormatan, kunjungan kerja Komisi, kunjungan kerja sister city, dan penyelenggaraan kegiatan pimpinan.

Realokasi anggaran tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD DKI Jakarta dalam mendukung penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta juga memutuskan untuk menghentikan sejumlah kegiatan, sehingga pengalihan anggaran diharapkan lebih produktif dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.

“Apalagi perekonomian warga Jakarta yang terimbas Covid-19 ini semakin menurun. Kita sebagai wakil rakyat sudah harus berperan. Karena itu saya meminta pengalihan alokasi anggaran yang ada di Komisi A, B, C, D, E itu dialihkan buat penanganan Covid-19,” kata Prasetio.

Ketua DPRD DKI itu meminta, jajaran eksekutif sebagai eksekutor dari realokasi anggaran kegiatan DPRD DKI dapat memastikan bahwa distribusi bantuan sosial wabah Covid-19 dilakukan tepat sasaran, dan tidak ada lagi kesalahan saat pemberian bantuan kepada warga yang tak berhak.